

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 83 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur dan Pergub Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan kinerja triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selaku penerima kewenangan dan Pengguna Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
2. Memberikan gambaran dan informasi mengenai tingkat pencapaian target triwulan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bagian/bidang untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan dari pada penyusunan laporan triwulan I Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah:

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
2. Memberikan laporan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
3. Terlaksananya Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program/kegiatan kerja secara afesien, efektif dan responsive serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

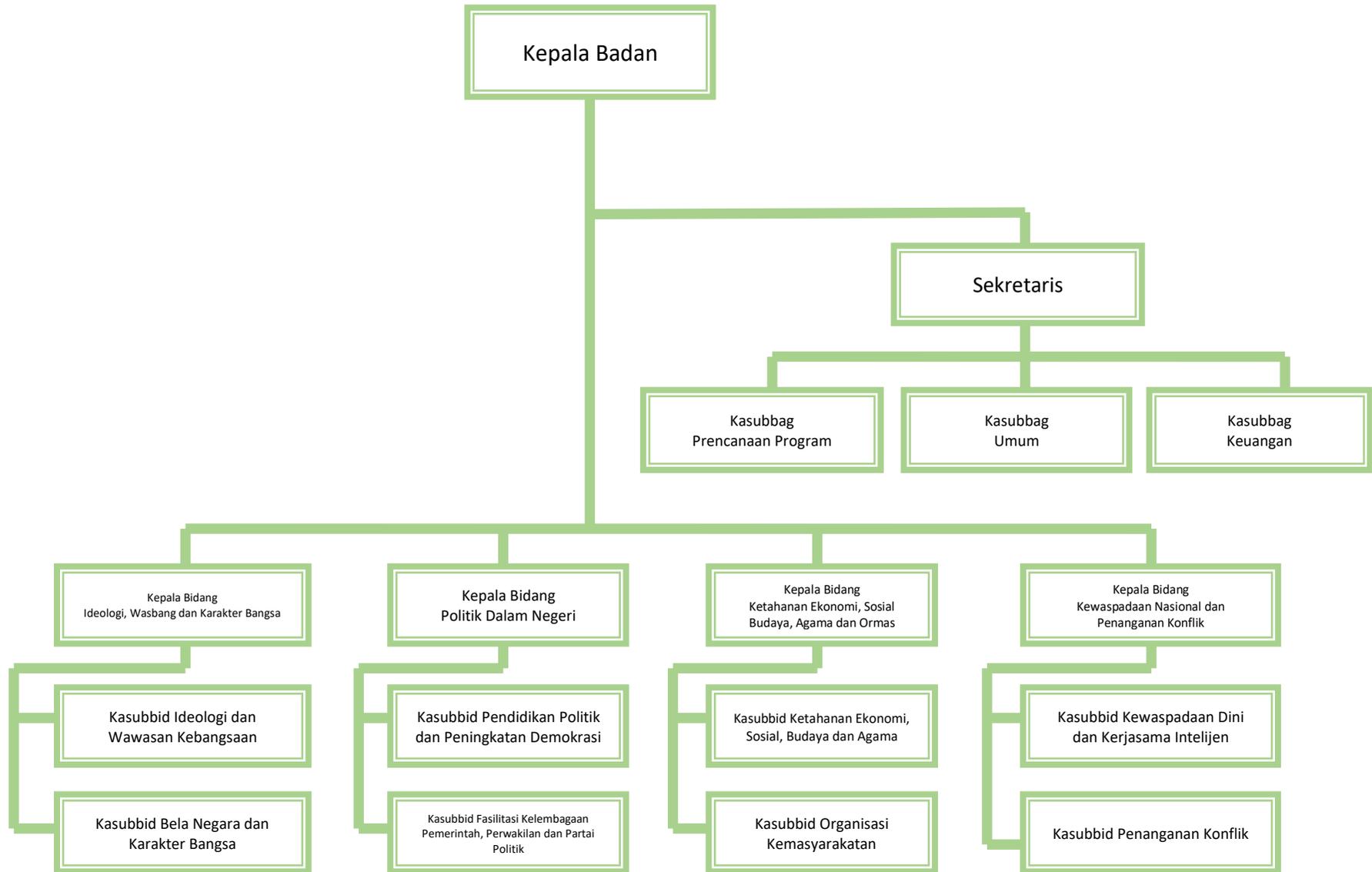
1. Perumusan kebijakan Teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub Bidang. Secara rinci struktur organisasi

dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur



## E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Maret 2022 mempunyai personil sebanyak 50 orang terdiri dari 16 pejabat struktural, 24 orang pejabat pelaksana, dan 10 orang tenaga kontrak. Adapun rekapitulasi pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim per 31 Maret 2022 sebagai berikut :

Table 1.1 Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JPT Pratama	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Administrator	3	2	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Pengawas	5	5	2	8	0	0	4	6	0	0	0	0
Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksana	19	5	0	10	14	0	0	6	3	16	0	0
Tenaga Kontrak	7	3	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
PNS	28	12	8	18	14	0	8	11	3	18	0	0
PNS + Tenaga Kontrak	7	3	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
Jumlah	50		8	18	14	0	8	15	3	24	0	0

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai OPD dalam pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Table 1.2 Rekap PNS Kesbangpol Prov. Kaltim berdasarkan Pendidikan dan Gender

Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
S.3	0	0	0
S.2	7	2	9
S.1	5	7	12
D.IV	0	0	0
D.III	2	1	3
D.II	0	0	0
D.I	0	0	0
SLTA	14	2	16
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>40</b>

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang harus diketahui Visi dan Misi Kepala Daerah Gubernur Kalimantan Timur untuk menyelaraskan perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur.

Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur:

Visi Kaltim berdaulat 2023 “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat “.

Dengan Misi :

1. Berdaulat Dalam pembangunan Sumber daya manusia yang berakhlak Mulia dan Berdaya saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
2. Berdaulat Dalam pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan;
3. Berdaulat Dalam Ke Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan
6. Berorientasi Pelayanan Publik;

Dari misi Kepala Daerah Kalimantan Timur tersebut, dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berada pada Misi ke Lima, kemudian kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Visi sebagai berikut :

Visi :

**“ Terwujudnya Masyarakat Yang damai, Tentram dan Demokratis Serta Berwawasan Kebangsaan di Wilayah Kalimantan Timur “.**

Dari visi Kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus diemban dengan melihat isu-isu yang ada dan masalah pokok maka pemecahan masalah adalah melalui Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai 4 Tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi;
2. Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang berideologi dan Berkarakter Bangsa;
3. Terwujudnya Ketahanan ekonomi, Sosial budaya dan pemberdayaan Ormas di Kaltim;
4. Terwujudnya Kewaspadaan dan kondusifitas di Kaltim;

Dari Tujuan bahwa Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat Strategik yakni kondisi, situasi,

keadaan, peristiwa yang menjadi sumber isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi, kejadian, atau fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja Organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melakukan review Renstra 2019-2023, tabel dari perencanaan target kinerja tahun 2021 yang meliputi dari pada visi, misi, tujuan, sasaran kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Timur dan juga merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA THN 2018	TARGET KINERJA THN 2022	TARGET KERJA TRIWULAN			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya masyarakat yang damai, tentram dan demokratis, serta berwawasan kebangsaan di wilayah Kaltim	Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang Demokratis	Terwujudnya masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indek Demokrasi Indonesia	72,86%	76,50%	25	25	26,50%	0
	Mewujudkn Partisipasi Politik Masyarakat Kaltim dalam kehidupan berdemokrasi	Terwujudnya Partisipasi Politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berdemokrasi Masyarakat	Persentase Hak-hak Politik	58,16%	68%	25%	25%	18%	
	Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan	Terwujudnya masyarakat Kaltim khususnya pelajar SLTA yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya Pelajar SLTA yang memahami Wawasan Kebangsaan	6% dari jumlah siswa tingkat SLTA 152.341	7 % (10.664)	1,75% (2.666)	1,75% (2.666)	1,75% (2.666)	1,75% (2.666)
	Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan	Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan Agama	Persestase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	100 %	100 %	25 %	25%	25 %	25%

	Ormas di Kaltim									
	Mewujudkan Pembinaan dan pemberdayaan Ormas dan Ketahanan Ekososbud di Kaltim	Terwujudnya Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan ormas	Persentase pembinaan dan pemberdayaan ormas	587 ormas	32,70% (120 Ormas)	8,17% (30 ormas)	8,17% (30 ormas)	8,17% (30 ormas)	8,17% (30 ormas)
	Mewujudkan kewaspadaan dan kondusifitas di Kaltim	Terwujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kaltim	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kaltim	Persentase Penanganan konflik sosial di Kaltim	507	33,33% (101)	8 % (25)	8 % (25)	8 % (25)	9,33% (26)

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022**

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022, yaitu terdapat satu sasaran, dengan satu indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM. Pencapaian pengukuran kinerja pada triwulan I dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut:

**Sasaran : Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 5 (lima) program. antara lain: Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Dari lima program tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan, yakni:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
  2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
  5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik,
  1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
  2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
  5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
  2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
  2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
  5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
  1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022

Tabel 3.1  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	25	25	100%

Berdasarkan data diatas perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target di triwulan I tahun 2022, dapat dikategorikan Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 100%.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur antara lain:

- o Metode Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan 4 sumber data, yaitu: (1) Review surat kabar local, (2) Review dokumen (Perda, Pergub, Dll), (3) Forum Group Discussion (FDG), (4) Wawancara mendalam, kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk perhitungan kuantitatif dengan dasar data utama dari hasil FDG dan Wawancara mendalam sedangkan untuk perhitungan kualitatif memakai data reuiu surat kabar/koding koran dan Dokumen. .
- o Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan Lembaga-lembaga demokrasi.

Kinerja demokrasi secara umum telah berada pada kategori Baik namun demikian perlu tetap dijaga dan ditingkatkan agar semakin lebih baik.

Aspek Kebebasan Sipil tetap pada kategori Baik, sedangkan capaian aspek Hak-hak Politik perlu dijaga dan ditingkatkan. Kinerja demokrasi pada aspek ini paling fluktuatif terutama pada

indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, dan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan. Untuk capaian Aspek Lembaga Demokrasi dalam merawat kinerja demokrasi dan meminimalisir hambatan-hambatan pelaksanaan praktek demokrasi di Kalimantan Timur diperlukan dukungan semua unsur terutama pejabat publik dan Lembaga Lembaga Demokrasi.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2022, diharapkan capaian tersebut dapat lebih ditingkatkan dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.

## 2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur triwulan I tahun 2021, dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja Triwulan I	% Penyerapan Anggaran Triwulan I	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	100%	2,94%	97,06%

## 3. Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2022 antara lain:

### 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Tabel 3.3  
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	1,75% (3000)	694	23,13%

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada triwulan I tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 23,13%, capaian kinerja dapat dikategorikan kurang. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan. Masing-masing capaian realisasi anggrannya 0%, 12,50%, 18,99%, 19,15% dan 16,90%.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada triwulan I tahun 2022 yaitu:

1. Kegiatan Sosialisasi bahaya paham Radikalisme dan Intoleransi SAT BINMAS Polres Penajam Paser Utara yang diselenggarakan Polresta PPU, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara.
  2. Kegiatan Pembinaan Pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar SLTA, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 di Kota Bontang.
  3. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kalimantan Timur, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tabel 3.4  
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Hak-hak Politik	Persen	25%	25%	100%

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik mendukung capaian sasaran, capaian kinerjanya pada triwulan I tahun 2022 sebesar 100%, capaian kinerja dapat

dikategorikan sangat baik. Program ini terdiri dari program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun 2022 adalah 0%, 0%, 15,50%, 14,03% dan 9,65%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang menunjang capaian sasaran triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2022 Kamis 3 Feb 2022.
2. Kegiatan Sosialisasi IDI kepada Aparatur dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Mercure Samarinda dengan peserta 100 orang.
3. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Disabilitas dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggara dengan peserta 100 orang.
4. Rapat TP3D dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022 di Hotel Haris dengan peserta 20 orang.
5. Rapat Tim Penilai Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan Kab/Kota dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022 dengan peserta 20 Orang.

Kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan I adalah :

1. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 di Hotel Mercure Samarinda, kegiatan tertunda karena adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana edaran Gubernur Kaltim.
2. Rapat Pokja IDI akan dijadwalkan ulang dan dilaksanakan setelah Rilis IDI Tahun 2021.
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 3.5  
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan. Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	Persen	8,17% (30 ormas)	29 ormas	96,67%

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dalam mendukung capaian sasaran, capaian kinerjanya pada triwulan pertama tahun 2022 sebesar 96,67% dapat dikategorikan sangat baik. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun 2022 adalah 0%, 0%, 0,05%, 4,62%, dan 32,17%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang menunjang capaian sasaran pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas dan Badan/Lembaga di Daerah, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari Tahun 2022 di Kota Balikpapan.
2. Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022.

3. Kegiatan Verifikasi Hibah dan Bansos, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 di Samarinda.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tabel 3.6  
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Persen	25% (1 Rekomendasi)	25% (1 Rekomendasi)	100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam mendukung capaian kinerja, realisasi capaian kinerjanya pada triwulan pertama tahun 2022 sebesar 100% dapat dikategorikan sangat baik. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu Kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggrannya pada triwulan pertama tahun 2022 adalah 0%, 25%, 1,98%, 93, 0%, 5,32%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menunjang capaian sasaran pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Dialog antar ummat beragama, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 di Samarinda.

2. Kegiatan Pembinaan Karya Seni dan Budaya sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 di samarinda.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Tabel 3.7  
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur	Persen	8,33% (25)	3	12%

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial juga mendukung capaian kinerja, realisasi capaian kinerjanya pada triwulan pertama sebesar 12% dapat dikategorikan kurang. Program ini terdiri dari enam sub kegiatan yaitu Kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. Masing-masing capaian realisasi anggrannya pada triwulan pertama tahun 2022 adalah 0%, 0%, 5,91%, 26,52% dan 0%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang menunjang capaian sasaran pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan rapat tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 di Samarinda.
2. Melaksanakan kegiatan rapat Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga/Organisasi Asing Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2022 di Samarinda.
3. Melaksanakan kegiatan rapat Tim Kewaspadaan Dini, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 di Samarinda.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang telah digunakan pada triwulan I tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan I tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Demokrasi Indonesia	25	25	100%	Rp.63,286,213,954.00	Rp.2,276,113,763.00	2,94%
<b>Jumlah</b>					<b>Rp.63,286,213,954.00</b>	<b>Rp.2,276,113,763.00</b>	<b>2,94%</b>

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim pada triwulan 1 tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 3.9  
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan pada Triwulan 1 Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target TW 1	Realisasi TW 1	%	
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,387,045,391.00	1,799,430,705.00	13,44%	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	363,576,000.00	1,653,400.00	0,4%	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,798,000.00	1,125,400.00	11,49%	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	353,778,000.00	528,000.00	0,15%	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10,029,775,235.00</b>	<b>1,459,601,935.00</b>	<b>83,93%</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,574,623,235.00	1,373,021,935.00	14,34%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,560,000.00	0	0%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	346,320,000.00	86,580,000.00	25%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61,272,000.00	0	0%	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9,636,000.00</b>	0.00	0%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	9,636,000.00	0.00	0%	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	51,000,000.00	0.00	0%	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,404,015,000.00</b>	<b>234,340,500.00</b>	<b>16,69%</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	387,005,000.00	8,264,000.00	2,14%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000.00	22,888,000.00	57,22%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,520,000.00	0.00	0%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965,490,000.00	203,188,500.00	21,05%	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>788,750,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	788,750,000.00	0	0%	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>493,885,656.00</b>	<b>100,614,870.00</b>	<b>20,37%</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	0.00	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,500,400.00	5,058,300.00	7,973%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415,385,256.00	95,556,570.00	23%	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>1,019,400,000.00</b>	<b>183,817,398.00</b>	<b>49,39%</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,019,400,000.00	183,817,398.00	49,39%	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	19,510,000.00	0	0%	

	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	3,840,000.00	480,000.00	12,50%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	561,050,000.00	106,548,998.00	18,99%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	145,200,000.00	27,806,000.00	19,15%	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika. dan Sejarah Kebangsaan	289,800,000.00	48,982,400.00	16,90%	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>2,979,278,800.00</b>	<b>137,029,760.00</b>	<b>4,60%</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2,979,278,800.00	137,029,760.00	4,60%	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,950,770,800.00	0	0%	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1,800,000.00	0	0%	

	Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	517,908,000.00	79,250,000.00	15,30%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	198,000,000.00	27,775,160.00	14,03%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	310,800,000.00	30,004,600.00	9,65%	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>56,166,717,290.00</b>	<b>71,195,300.00</b>	<b>0,13%</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<b>56,166,717,290.00</b>	<b>71,195,300.00</b>	<b>0,13%</b>	
	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18,652,000.00	0	0%	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	926,000.00	0	0%	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan	55,958,139,290.00	27,755,000.00	0,05%	

	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	63,000,000.00	2,908,700.00	4,62%	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	126,000,000.00	40,531,600.00	32,17%	
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>629,231,000.00</b>	<b>14,924,000.00</b>	<b>2,37%</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	629,231,000.00	14,924,000.00	2,37%	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	364,000.00	0	0%	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	960,000.00	240,000.00	25%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	459,907,000.00	9,100,000.00	1,98%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	63,000,000.00	0	0%	
	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya. dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	105,000,000.00	5,584,000.00	5,32%	
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN</b>	<b>3,248,904,000.00</b>	<b>69,716,600.00</b>	<b>2,15%</b>	

	<b>FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<b>3,248,904,000.00</b>	<b>69,716,600.00</b>	<b>2,15%</b>	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	720,000.00	0.00	0,00%	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,128,000.00	0.00	0,00%	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	492,671,000.00	0.00	0,00%	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	162,000,000.00	9,580,000.00	5,91%	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	226,800,000.00	60,136,600.00	26,52%	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2,365,585,000.00	0.00	0,00%	

<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>77,430,576,481.00</b>	<b>2,276,113,763.00</b>	<b>2.94%</b>	
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------	--

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi keuangan per program kegiatan mencapai 2,94% hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan belum terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disebabkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagaimana edaran Gubernur Kaltim.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah atas petunjuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan kategori **Sangat Baik**, hasil laporan akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 100%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I tahun 2022 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan hasil yang optimal.

Demikian Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ini disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan di triwulan selanjutnya.

Samarinda, 08 April 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur

**Drs. Sufian Agus. M.Si**  
**Pembina Tingkat IV/b**  
**NIP. 196602041988031016**